

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengangguran adalah masalah utama yang melanda Indonesia setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa pada tahun 2022, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Sementara itu, secara global, Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Setelah Amerika Serikat, India, dan Tiongkok. Pada tahun 2022, terdapat 135,61 juta orang yang aktif bekerja di Indonesia, meningkat 128 juta orang dari tahun sebelumnya. Orang-orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan jumlah individu yang begitu banyak, maka dibutuhkan banyak kesempatan kerja. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban yang signifikan untuk memastikan bahwa semua penduduknya memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Memiliki pekerjaan akan memudahkan untuk mengembangkan lingkungan yang berkembang di mana orang dapat memenuhi semua kebutuhan dasar mereka. Pemerintah memiliki pandangan bahwa mereka bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh warga negara.

Untuk saat ini setiap daerah di Indonesia sangat melekat dengan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial yang rendah. Selain itu, wilayah pedesaan menyumbang bagian yang tidak proporsional dari tingkat kemiskinan Indonesia, menurut Kepala BPS Margo Yuwono, yang melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin secara keseluruhan di Indonesia telah meningkat menjadi 26,16 juta per Maret 2022. (Data Kemiskinan di Indonesia BPS 2022) menunjukkan bahwa 14,34 juta orang tinggal di daerah pedesaan sedangkan 11,82 juta orang tinggal di daerah perkotaan. Lapangan pekerjaan dengan gaji yang tinggi sangat dibutuhkan oleh seluruh warga negara Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini dilakukan agar mereka dapat meningkatkan kehidupan sehari-hari mereka dengan membina komunitas yang berkembang. Negara memiliki tanggung jawab untuk

memperhatikan kepentingan terbaik bagi rakyatnya. Menurut Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," semua warga negara memiliki hak hukum untuk mendapatkan pekerjaan yang memenuhi standar dasar kesusilaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk mengatasi masalah pengangguran.

Adapun bebrbagai permasalahan yang berkaitan dengan dunia pekerjaan, seperti yang terjadi di Indonesia hingga saat ini adalah masih munculnya permasalahan terutama karena ketidaksesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan yang tersedia.

Peningkatan jumlah karyawan dan populasi di Yogyakarta sendiri telah terjadi pada saat kapasitas provinsi ini untuk menciptakan lapangan kerja baru telah menyusut secara dramatis. Menurut data yang dikumpulkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta, tingkat pengangguran tahunan di Provinsi Yogyakarta biasanya berada di kisaran 4,5 hingga 5%, dengan kecenderungan sedikit menurun selama lima tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018, ketika tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,69 persen, angka 4,06 persen pada tahun 2022 merupakan sebuah perbaikan. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka nasional yang berada di kisaran 7-10%, angka ini terlihat lebih rendah. Beberapa variabel mempengaruhi tingkat pengangguran di DIY, termasuk pertumbuhan PDB, upah minimum, dan inflasi. Agar jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran pada akhirnya akan menurun jika hal ini terjadi. Provinsi DIY merupakan salah satu daerah otonom yang harus berupaya meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB). Perekonomian Provinsi DIY telah tumbuh dengan stabil selama lima tahun terakhir, dan seiring dengan itu, angkatan kerja di provinsi ini juga bertambah. Tabel usia produktif di Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tabel Usia Produktif di Yogyakarta.

Usia Produktifitas	Usia Produktif								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki dan Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
0 - 14	28701 4.00	28433 4.00	28140 8.00	274791.0 0	272280.0 0	269571.0 0	561805.00	556614.00	550979.0 0
15 - 64	91485 5.00	91612 7.00	91647 6.00	895194.0 0	897688.0 0	899121.0 0	1810049.0 0	1813815.0 0	1815597.0 0
65 +	60610. 00	63455. 00	66441. 00	71244.00	74004.00	77086.00	131854.00	137459.00	143527.0 0
Rasio Ketergantungan	38,00	37,96	37,96	38,65	38,58	38,56	38,32	38,27	38,25

(sumber: bps Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DIY untuk menetapkan upah minimum provinsi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mendorong keterlibatan karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja melalui gaji yang sesuai. Selama lima tahun terakhir, upah minimum di Provinsi DIY terus meningkat. Peningkatan upah minimum diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pekerja, yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi pertumbuhan perusahaan dan kesejahteraan karyawan dan manajemen melalui lingkungan bisnis yang lebih kooperatif dan adil.

Tabel 1. 2 Tingkat Upah Minimum Provinsi DIY Selama Lima Tahun Terakhir.

Nama daerah Provinsi	Tahun UMR/UMP	Besaran UMP (Rp.)	No. Peraturan
Provinsi Yogyakarta D.1	UMP Tahun 2021	Rp. 1.765.000,00	Nomor. 319 /KEP /2020 Tgl.31-10-2020
	Kenalkan (%)	3,540 %	
	UMP Tahun 2020	Rp. 1.704.608,25	
	Kenalkan (%)	8,510 %	
	UMP Tahun 2019	Rp. 1.570.923,00	Nomor. 319 /KEP /2018 Tgl.31-10-2018
	Kenalkan (%)	8,030 %	
	UMP tahun 2018	Rp. 1.454.154,15	
	Kenalkan (%)	8,710 %	
	UMP Tahun 2017	Rp. 1.337.645,00	

(sumber: databoks.katoda.co.id)

Pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam mengatasi krisis pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Bidang yang mengatur penempatan dan perluasan kerja.

Apa yang diantisipasi adalah pertumbuhan yang lebih terarah, oleh karena itu pemerintah provinsi bekerja untuk menawarkan tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan produktif untuk mencocokkannya. Disnakertrans bertujuan untuk mengurangi pengangguran dengan memberi informasi kepada masyarakat tentang lowongan pekerjaan melalui pasar kerja, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk mengimplementasikan undang-undang ketenagakerjaan untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di Yogyakarta. Karena jumlah orang yang mencari pekerjaan diperkirakan akan meningkat lebih cepat daripada jumlah lapangan kerja yang tersedia, bantuan pemerintah sangat penting dalam bidang ini; untungnya, pemerintah juga memiliki sarana untuk melaksanakan tugas-tugas Disnakertrans secara langsung. Tujuan utama Disnakertrans adalah untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja yang tersedia sehingga lebih banyak orang dapat memperoleh upah yang layak dan dengan demikian mengurangi pengangguran; selain itu, perusahaan berusaha untuk mengembangkan strategi pengembangan tenaga kerja yang seragam dan kohesif yang mengutamakan keterampilan karyawan. Tanggung jawab utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DISNAKERTRANS DIY) adalah mengurangi pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan salah satu caranya adalah melalui penempatan. Pada Agustus 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY sebesar 4,56 persen, turun dari 4,57 persen pada Agustus 2020.

Tanggung jawab bidang penempatan tenaga kerja antara lain seperti yang tercantum dalam ayat 1 bidang penempatan tenaga kerja.

1. Penyelenggaraan dan pengkajian bahan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja
2. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitas penempatan tenaga kerja
3. Penyelenggaraan fasilitas penempatan tenaga kerja.

Adapun rician tugas di bidang penempatan ini adalah:

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi penempatan tenaga kerja;
3. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan pasar kerja;
4. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
5. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyaluran tenaga kerja;
6. Menyelenggarakan fasilitasi penempatan tenaga kerja;

7. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penempatan tenaga kerja;
8. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
9. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
11. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
12. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah diharapkan tepat sasaran dan mampu memenuhi tujuan dalam melaksanakan proyek-proyek padat karya sebagai bagian dari pengendalian manajemen program untuk mengatasi dan mengurangi pengangguran. Kegiatan pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menghasilkan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, dan pengentasan kemiskinan disebut dengan "program padat karya". Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketika pemerintah memberikan dana kepada desa, pemerintah memberikannya dengan maksud agar desa itu sendiri yang menentukan dan melaksanakan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Pembangunan berbasis masyarakat (community-driven development/CDD) adalah jenis pembangunan masyarakat yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya.

Salah satu contoh implementasi program padat karya dalam bentuk pembangunan berada di Kalurahan Sendangsari, Program Padat Karya melalui

Dana Keistimewaan DIY Tahun 2021 di Kalurahan Sendangsari. Hal itu ditandai dengan diadakannya sosialisasi bagi pekerja padat karya pengembangan potensi desa melalui Dana Keistimewaan DIY di Padukuhan Girinyono pada Selasa 08 Juni 2021. Sosialisasi berlangsung di Pendopo Padukuhan Girinyono yang dihadiri oleh 60 peserta program padat karya melalui dana keistimewaan DIY meliputi pembangunan gapura dan tempat wudhu di Makam "Sunan Geseng" serta pembangunan Gazebo di sekitar. Program padat karya pada umumnya berhasil meningkatkan akses terhadap infrastruktur. Namun, ekonomi dan penduduk setempat belum tentu mendapatkan manfaat dari aksesibilitas yang tinggi ini. Kesalahan dalam mengidentifikasi khalayak yang dituju dan luasnya program sering kali menjadi penyebabnya.

Tanggul di dusun Bandaran dan Klegung di Donokerto, Turi, jalan rabat beton dan sumur resapan di Sidomulyo, Trimulyo, Sleman, tanggul di dusun Ganggong dan Jurugan di Bangunkerto, Turi, tanggul, corblok, dan jalan rabat beton di Ngumbul, Bangunkerto, Turi, tanggul di Binangun, Merdikore,

Swakelola, menggunakan tenaga kerja dan bahan baku lokal, serta upah harian mingguan merupakan kunci dari prinsip-prinsip utama program padat karya. Meskipun tingkat pengangguran di daerah pedesaan saat ini lebih rendah dibandingkan dengan daerah metropolitan, namun angka pengangguran di daerah pedesaan masih cukup tinggi, yaitu 4,01 persen. Oleh karena itu, program-program yang membutuhkan banyak tenaga kerja namun menarik banyak pekerja dengan cepat mengurangi pengangguran. Sebagai hasilnya, penduduk setempat diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk hibah dengan nominal hingga dua puluh juta rupiah untuk satu kelompok di masyarakat kampung dalam upaya menurunkan angka pengangguran. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa. Hal ini dimaksudkan agar dengan terlibat dalam kegiatan ini, organisasi yang terlibat dalam kegiatan padat karya dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dapat dieksploitasi dengan lebih baik untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Untuk

mengurangi prevalensi pengangguran di suatu daerah, kegiatan padat karya bertujuan untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja yang tersedia dan mempekerjakan orang secara produktif dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan mendorong pertumbuhan usaha baru.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas menunjukkan bahwa peran Disnakertrans didalam menekan angka pengangguran di Yogyakarta sangat penting dan banyak faktor yang menjadi kendala dalam menekan angka pengangguran, contohnya adalah banyak lulusan tetapi lapangan pekerjaan masih kurang dan juga tingginya penawaran pekerjaan namun permintaan pekerjaan itu sendiri rendah. Melihat dari fenomena meningkatnya pengangguran di Indonesia, peneliti tertarik meneliti tentang **"Efektivitas Program Padat Karya DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS) Di Daerah Istimewa Yogyakarta**. Mengingat tanggung jawab pemerintah, sangat penting bagi para pekerja untuk memiliki kualitas yang lebih tinggi. Dan kewajiban yang signifikan untuk membantu semua rakyatnya menemukan pekerjaan yang memuaskan. Pekerjaan dikatakan dapat meningkatkan standar hidup masyarakat dan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemerintah berpandangan bahwa mereka bertanggung jawab atas keselamatan rakyat.

1.2 Rumusan masalah penelitian:

Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan program padat karya tunai dalam mengatasi permasalahan pengangguran
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadikan hambatan dalam melaksanakan program padat karya
3. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program padat karya dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3 Tujuan dari penelitian ini:

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan program padat karya tunai dan non tunai dalam mengatasi permasalahan pengangguran
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadikan hambatan dalam melaksanakan program padat karya
3. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program padat karya dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Daerah Istimewah Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dari perspektif teoretis, penelitian ini akan membantu menjelaskan sejauh mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY telah melakukan upaya-upaya dalam memerangi pengangguran lokal melalui pelaksanaan program-program padat karya.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi yang tertarik dengan efektivitas program padat karya dalam mengurangi krisis pengangguran di Yogyakarta.
 - b. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai transformasi pengetahuan dan referensi bagi pemerintah, khususnya untuk membantu program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dalam mengatasi pengangguran melalui pelaksanaan program padat karya, dengan tujuan akhir untuk menurunkan tingkat pengangguran tahunan.
 - c. Penelitian ini juga dapat membantu para akademisi untuk mempelajari lebih lanjut mengenai dampak dari program padat karya dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran di Yogyakarta.

1.5 Sistematika Bab

1. Bab pertama adalah prolog. Motivasi teoritis dan praktis untuk penelitian ini, serta tujuan dan hasil yang ingin dicapai, diuraikan dalam bagian ini.
2. Literatur ditinjau dalam Bab II. Bagian bab ini memberikan gambaran umum mengenai teori yang mendasari, studi yang relevan, dan kerangka konseptual.
3. Pendekatan penelitian dibahas dalam Bab III. Peneliti menjelaskan sifat penelitian, prosedur yang akan digunakan, waktu dan tempat penelitian, sumber data yang akan digunakan, dan metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.
4. Pada Bab IV, temuan dan interpretasi dari penelitian ini disajikan, dan faktor-faktor yang menghambat proses perencanaan pembangunan dibahas. Bab ini merupakan bagian diskusi penelitian dari studi ini.
5. Bagian penutup dari laporan penelitian ini adalah Bab V, yang berisi rekomendasi dan temuan tentang efisiensi program padat karya.

